

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara dengan keragaman yang sangat luas, baik dari segi agama, budaya, sosial, ekonomi, maupun kondisi geografisnya. Keberagaman ini menciptakan tantangan besar dalam mencapai pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Namun, keberagaman tersebut memberikan potensi bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya setempat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pembangunan secara mandiri, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Melalui penerapan desentralisasi maka pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, untuk memastikan pemerintah daerah mempercepat pembangunan dan mengejar ketertinggalan pembangunan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menetapkan bahwa Belanja Daerah harus diprioritaskan untuk meningkatkan layanan kesehatan,

pendidikan, pelayanan dasar, serta menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai, termasuk pengembangan sistem jaminan sosial.

Belanja Daerah terbagi kedalam beberapa kategori yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Anggaran Belanja Modal dalam APBD adalah bentuk alokasi dana pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap daerah. Anggaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur adalah belanja modal.

Menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia (2020), belanja modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode anggaran. Sedangkan menurut Halim (2014), belanja modal merupakan investasi pemerintah dalam bentuk pengadaan barang modal yang digunakan untuk meningkatkan layanan publik. Sementara itu, Mardiasmo (2017) menegaskan bahwa belanja modal berperan dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut World Bank (2019) mendefinisikan pembangunan infrastruktur adalah proses perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Infrastruktur mencakup jalan, jembatan, sistem irigasi, serta bangunan pemerintah yang digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas publik. Dengan demikian, optimalisasi alokasi belanja modal dalam pembangunan infrastruktur menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa

setiap dana yang dikeluarkan memberikan dampak yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Todaro dan Smith (2020), pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Infrastruktur yang memadai tidak hanya berfungsi sebagai penunjang aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, jaringan listrik, air bersih, serta fasilitas publik lainnya akan memperlancar akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendorong investasi diberbagai sektor. Dengan demikian, investasi yang tepat dalam pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, serta dampaknya terhadap pembangunan jangka panjang

Belanja modal menjadi salah satu instrumen utama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. Namun dalam kenyataannya, penggunaan belanja modal sering kali belum menunjukkan efisiensi yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketidakseimbangan antara alokasi anggaran dengan realisasi pelaksanaan dilapangan. Data dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Malaka menunjukkan bahwa dalam periode 2019-2024, terjadi fluktuasi realisasi belanja modal dari tahun ke tahun. Beberapa komponen belanja

bahkan menunjukkan tingkat realisasi yang tidak mencapai target yang direncanakan, terutama pada sektor belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

Tabel 1.1
Belanja modal Kabupaten Malaka Tahun 2019-2024

Tahun	Uraian	Jumlah/Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
2019	Belanja Modal	192,106,179,073	138,974,706,408	72,34
	Belanja modal peralatan dan mesin	40,165,271,585	29,016,410,156	72,24
	Belanja modal gedung dan bangunan	77.125.036.772,40	55,334,823,984	71,75
	Belanja modal jalan,jaringan,dan irigasi	71,857,289,366	54.623.472.268,41	76,02
2020	Belanja Modal	99,005,162,698	76,179,519,361	76,94
	Belanja modal peralatan dan mesin	25,956,105,745	25,115,744,882	96,76
	Belanja modal gedung dan bangunan	41,776,155,454	31,292,811,865	74,90
	Belanja modal jalan,jaringan,dan irigasi	23,914,926,905	19,770,962,614	82,67
2021	Belanja Modal	155,579,360,779	119,311,564,720	103,2
	Belanja modal peralatan dan mesin	24,508,862,618	22,334,670,850	91,12
	Belanja modal gedung dan bangunan	78,521,545,459	54.094.223.530	68,89
	Belanja modal	49,898,952,702	42,882,670,340	85,94

	jalan,jaringan,dan irigasi			
2022	Belanja Modal	137,023,274,783	124,400,949,366	90,78
	Belanja modal peralatan dan mesin	30,330,740,397	26,655,053,042	87,88
	Belanja modal gedung dan bangunan	57,158,803,239	55,372,554,658	96,87
	Belanja modal jalan,jaringan,dan irigasi	48,894,481,647	42,373,341,666	86,66
2023	Belanja Modal	256,447,195,147	225,147,749,275	87,79
	Belanja modal peralatan dan mesin	37,172,114,115	36,532,239,616	98,27
	Belanja modal gedung dan bangunan	137,107,445,585	120,995,080,403	88,24
	Belanja modal jalan,jaringan,dan irigasi	81,212,139,747	67,620,429,256	83,26
2024	Belanja Modal	158,390,105,076	150,229,529,384	94,84
	Belanja modal peralatan dan mesin	12,299,774,902	11,611,485,314	94,40
	Belanja modal gedung dan bangunan	62,314,980,569	60,852,302.331	97,65
	Belanja modal jalan,jaringan,dan irigasi	83,242,557,605	77,765,741,738	93,42

*Sumber data : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Kabupaten Malaka*

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat adanya fluktuasi dalam alokasi dan realisasi belanja modal di Kabupaten Malaka selama periode 2019–2024. Secara umum, terdapat ketidakseimbangan antara anggaran yang dialokasikan dan realisasi belanja modal setiap tahunnya.

Anggaran belanja modal pada tahun 2019 sebesar Rp192,1 miliar, namun realisasinya hanya Rp138,9 miliar atau sekitar 72,34%. Ketidakseimbangan ini juga terlihat dalam kategori belanja modal lainnya, seperti belanja modal peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar 72,24%, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 71,75%, serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 76,02%.

Alokasi belanja modal menurun drastis tahun 2020 menjadi Rp99,0 miliar, dengan realisasi sebesar Rp76,1 miliar atau sekitar 76,94%. Penurunan anggaran ini berdampak pada seluruh kategori belanja modal, meskipun tingkat realisasinya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Anggaran belanja modal tahun 2021, kembali meningkat menjadi Rp155,5 miliar, dan realisasinya mencapai Rp119,3 miliar atau sekitar 103,2%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam serapan anggaran. Namun, belanja modal gedung dan bangunan masih memiliki tingkat realisasi yang relatif rendah, yaitu hanya 68,89%.

Belanja Modal pada tahun 2022 mengalami peningkatan lebih lanjut dalam efektivitas serapan anggaran dengan tingkat realisasi sebesar 90,78% dari total anggaran Rp137,0 miliar. Ketidakseimbangan masih terjadi,

terutama dalam kategori belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, yang hanya terealisasi sebesar 86,66%.

Anggaran belanja modal tahun 2023 melonjak signifikan menjadi Rp256,4 miliar, dengan realisasi sebesar Rp225,1 miliar atau 87,79%. Meskipun persentase realisasi cukup tinggi, terdapat ketimpangan antara alokasi dan realisasi pada beberapa kategori, terutama dalam belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, yang hanya terealisasi sebesar 83,26%.

Alokasi belanja modal untuk tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp158,3 miliar, dengan estimasi realisasi Rp150,2 miliar atau 94,84%. Meskipun terdapat peningkatan realisasi, kategori belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi masih menunjukkan ketidakseimbangan dengan tingkat realisasi 93,42%.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malaka Tahun 2021–2026, terdapat sejumlah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas utama. Beberapa diantaranya adalah, peningkatan dan pembangunan jalan penghubung antar desa dan kecamatan, pembangunan serta rehabilitasi jaringan irigasi untuk mendukung sektor pertanian, pembangunan gedung sekolah dasar dan menengah, serta fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan pembangunan kantor-kantor pelayanan publik untuk memperkuat sistem pelayanan kepada masyarakat.

Kebutuhan tersebut juga diperkuat oleh hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan langsung permintaan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan baru, perbaikan jembatan, irigasi teknis, serta tambahan ruang kelas. Namun kenyataannya, sebagian besar dari usulan tersebut tidak terealisasi karena anggaran yang tersedia tidak cukup, atau tidak dialokasikan secara tepat sasaran.

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara alokasi anggaran belanja modal dengan kebutuhan nyata pembangunan di lapangan. Padahal, bila alokasi anggaran dilakukan secara efektif, maka belanja modal dapat memberi dampak besar terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian untuk menilai efisiensi alokasi belanja modal, khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malaka.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kinerja keuangan daerah yang meliputi rasio efisiensi belanja modal. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif mengenai seberapa jauh alokasi belanja modal telah mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

Adapun penelitian terdahulu yang Intan Lidia Putri dan Vivi (2024) dengan judul Realisasi Anggaran Belanja Modal terhadap Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Sambas menunjukkan bahwa efektivitas realisasi anggaran belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

keberhasilan pembangunan infrastruktur. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2020 belanja modal terealisasi sebesar 94% dan dinilai efektif, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan hingga 88,1% pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor penghambat, seperti kondisi alam, keterbatasan keuangan daerah, dan kendala teknis. Hasil tersebut memperkuat pentingnya analisis terhadap efektivitas belanja modal, terutama untuk memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah.

Penelitian oleh Yusrida Ernawati (2023) yang berjudul Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kota Medan juga menunjukkan bahwa belanja modal berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam penelitiannya, kinerja keuangan daerah seperti kemandirian fiskal, efektivitas, dan efisiensi keuangan dianalisis bersama dengan belanja modal untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Medan selama periode 2014–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **”Analisis Efisiensi Alokasi Belanja Modal dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Malaka”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **Efektivitas Alokasi Belanja Modal dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Malaka**

1.3 PERSOALAN PENELITIAN

Persoalan dalam penelitian sebagai berikut :

- a Bagaimana efisiensi alokasi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malaka?

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a Untuk menganalisis efisiensi alokasi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malaka

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a Manfaat Akademik

Memberikan referensi bagi program studi manajemen khususnya jalur minat keuangan daerah

- b Manfaat Praktis

Memberikan informasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Malaka berkaitan dengan efektivitas alokasi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur